

PESANTREN DAN PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS AKHLAKUL KARIMAH

Abdul Mukit
Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan
e-mail: muqitabdul1988@gmail.com

Abstrak

Pesantren sejak dahulu dikenal sebagai pusat pengembangan tujuan utama dan inti dari pendidikan yaitu akhlak sebagai misi diutusny Rasulullah SAW. Dan pada kisahnya yang pertama, pesantren selalu bersama, tidak pernah berpandangan dan bersikap sekularistik terhadap politik. Sejak sebelum dan pasca kemerdekaan, santri selalu mengawal perpolitikan di Indonesia baik berada di dalam pemerintahan atau di luar sebagai oposan. Dinamika pergerakan santri dalam politik sangat menarik, sebab santri yang kental dengan nilai-nilai akhlak, budi pekerti bersetujuan dengan nilai-nilai politik yang banyak di pahami bersifat pragmatis. Namun dalam sejarah, persentuhan santri dengan politik relatif bisa memberikan warna unik dan penting. Inilah yang akan diungkap pada artikel ini.

Kata kunci: *Pesantren, Politik, Pendidikan.*

Abstract

Pesantren has long been known as a center for the development of the main and core objectives of education, namely morality as the mission of the Prophet SAW. And in the first story, pesantren are always together, they never have a secularistic view of politics. Since before and after independence, santri have always guarded politics in Indonesia, either inside the government or outside as opposition. The dynamics of the santri movement in politics are very interesting, because the santri who are thick with moral values, character are in contact with political values which are widely understood to be pragmatic. But in history, the relative touch of santri with politics can provide a unique and important color. This is what this article will reveal.

Key words: *Pesantren, politics, education.*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang pesantren dan politik pada konteks era kini, memang seperti membicarakan dua idealisme dan kutub yang saling berseberangan. Satunya diperspesikan sebagai penjaga nilai-nilai moral dan satunya berprinsipkan pragmatisme kepentingan.

Dalam dunia politik dikenal beberap ungkapan; di politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Tidak kawan abadi yang ada hanya kepentingan abadi. Seorang kawan dulu pernah berseloroh, perbedaan Kiai dan Politisi itu bila Kiai boleh salah tapi tidak boleh bohong, sementara politisi boleh bohong tapi tidak boleh salah. Politik menghalalkan segala cara.

Jika di telaah, beberapa ungkapan tersebut memang sejalan dengan fakta yang ada. Misalnya dalam politik dipertontonkan, perebutan kekuasaan, mengorbankan kawan dan bahkan melakukan tindakan culas dan curang. Salah satu tindakan yang paling berat adalah korupsi. Seperti yang disampaikan oleh

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif tersebut mencapai 36 persen dari total perkara yang ditangani KPK. "Korupsi yang ditangani KPK 36 persen atau 397 perkara, itu adalah melibatkan pejabat politik. Anggota DPR/DPRD 257, wali kota/bupati 119, ini sampai Mei 2020," (Kompas, <https://nasional.kompas.com/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020>, Akses 30 September 2020).

Disatu sisi, pesantren dianggap sebagai instiusi penegak dan penumbuh kembangan nilai-nilai moral dan etika yang lebih pas dengan istilah akhlah. Pesantren menempatkan akhlah sebagai *core* semua jenis pengembangan yang ada didalamnya. Jargon klasik nan sakti pesantren adalah, kesopnan lebih tinggi nilainya dari pada kecerdasan, menunjukan bahwa posisi pesantren sebagai *moral force* yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga dakwah keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi ini sejak lama di laksanakan oleh pesantren yang baru-baru ini di formalkan dalam substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan disebutkan jelas bahwa peran pesantren meliputi tiga hal, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. (NU Online, <https://www.nu.or.id/post/read/96680/ruu-pesantren-kembalikan-fungsi-dan-peran-penting-pesantren>. Di akses pada 3 Oktober 2018).

Studi ini ingin menelaah tentang hubungan pesantren dan politik dalam tinjauan ideologis dan historis yang di hubungkan dengan banyaknya santri terjun ke dunia politik.

METODE

Metode penelitian ialah cara kerja meneliti, mengkaji dan menganalisis objek sasaran penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode *survei literature* (Adi, 2004: 128) yaitu mencari dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan objek kajian teks tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan penelitian pustaka (*library research*) (Ibid, 2004: 128), yaitu dengan menelusuri data pustaka yang ada dalam buku serta melengkapinya dengan pustaka lain yang berhubungan dengan kajian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis *content* buku dan didukung berbagai literatur yang berhubungan dengannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah buku-buku yang berbicara secara khusus tentang pesantren dan kiai seperti buku Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, dan lainnya. Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan objek kajian pendidikan, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel yang tersebar di situs-situs internet, dan data lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

Sesuai dengan model penelitian yang bersifat (*library research*), data-data di atas ditelusuri dengan menggunakan metode *content analysis*. Analisis isi sangat penting untuk mengungkap *content* data-data kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang memuat tema dan signifikansi masalah yang sedang di kaji. Untuk menggunakan analisis isi ini, perlu diuraikan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus (Sudatro, 1996: 42) Metode deduktif ini digunakan untuk menganalisis semua data yang ada dalam buku objek kajian serta data lainnya, kemudian ditarik satu kesimpulan dari data-data tersebut.
2. Induktif, yaitu menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statemen (Ari Kunto, 1996: 42). Metode induktif digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk argumentasi, klaim maupun lainnya yang ada pada objek kajian penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendidikan

Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata didik, mendapat awalan *pen-* dan akhiran *an* yang berarti proses, perbuatan, cara mendidik,elihara dan ajar (Tim Penyusun Kamus, 1994: 42). Atau ia adalah terjemahan dari bahasa Yunani, *paedagogie* yang bermakna pendidikan dan *paedagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan orang yang tugasnya membimbing atau mendidik dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut *paedagogos* yang berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing dan memimpin) (Arief, 2002: 17).

Secara terminologis, terdapat beberapa perbedaan para pakar. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses yang

bertugas untuk pengubahan perilaku, bertujuan untuk mendewasakan manusia, dengan cara pengajaran dan pelatihan (Op.cit, 1994; 42).

Definisi diatas diuraikan secara lebih jelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 bahwa, pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Sembiring, 2010: 10-11).

Dilanjutkan oleh D. Marimba (Poerbakawatja, 1981:257) yang menjelaskannya sebagai, “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.”

Sedangkan Zakiyah Daradjat (Daradjat, 1992: 27) mengartikannya dengan, “suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam menyampaikan pelajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan kepribadian peserta didik.”

Kesimpulan dari beberapa pandangan diatas adalah bahwa pendidikan harus dilakukan secara sadar, oleh pendidik, melalui pengajaran atau pelatihan untuk membuat manusia menjadi baik. Definisi diatas lebih menjelaskan makna pendidikan dalam kerangka pendidikan formal, yaitu pendidikan di sekolah. Namun bagaimana dengan tugas pendidikan pada ranah non formal, misalnya bimbingan dari alam sekitar, bimbingan dari budaya, pendidikan di dalam rumah tangga dan di masyarakat. Tidakkah hal tersebut mencakup makna dan juga melaksanakan tugas-tugas pendidikan seperti di jelaskan diatas?

Ahmad Tafsir (Tafsir, 2012: 36) menyatakan bahwa, mencari kata yang tepat untuk merumuskan definisi pendidikan secara utuh memang sulit. Hal ini disebabkan antara lain: pertama, banyaknya jenis kegiatan yang disebut dengan kegiatan pendidikan, kedua, luasnya aspek yang dibina oleh pendidikan.

Kedua faktor meliputi, jenis kegiatan pendidikan yang beragam dan luasnya aspek yang dibina diatas membuat para pakar pendidikan berbeda pendapat. Misalnya pendapat yang menyatakan bahwa, pendidikan adalah kehidupan, dan kehidupan adalah pendidikan (Mastuhu, 1999:xi). Bahwa pendidikan tidak dibatasi oleh apapun. Setiap pelajaran dan bimbingan yang diperoleh seseorang,

berasal darimana saja dapat disebut pendidikan. Betapa luas pendapat ini menampung semua jenis kegiatan yang berupa semua aktifitas kehidupan.

Dengan makna yang lebih luas sekaligus sempit, *Ensiklopedia Pendidikan* (Perbakawatja, 1981: 257) mengartikannya dengan, “semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniyah maupun rohaniyah.” Luas karena mencakup semua perbuatan dan usaha, sekaligus sempit karena hanya dilakukan oleh orang tua.

Al-Ashfihânî dan Al-Baidlôwî (Al-Ashfihani, 1412 H: 148) mengartikannya sebagai proses pembentukan (*tansyiah*) dan pengantaran (*tabligh*) sesuatu secara bertahap hingga sempurna.

Rasyîd Manshûr Al-Shabâhî (Al-Shabahi, 2008: 39) mencoba menghimpun beberapa pengertian pendidikan dari para pemikir Muslim dan memilih mengartikannya sebagai:

Menjaga dan mengawasi fitrah anak didik yang sedang tumbuh, memberdayakan dan menyiapkan potensinya secara utuh, serta mengarahkan fitrah dan potensi-potensi tersebut menuju kebaikan dan kesempurnaan yang sesuai secara bertahap (tadarruj).

Oleh karena itu, Ahmad Tafsir (Tafsir, 2012: 36) menjelaskan pendidikan sebagai pengembangan pribadi dalam semua aspeknya, yaitu aspek jasmani, akal dan hati (*ruhani*).

Lebih lanjut, Ahmad Tafsir menyampaikan bahwa Konferensi International Pendidikan Islami Pertama (*First World Conference on Muslim Education*) yang diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1977, belum berhasil membuat rumusan yang jelas tentang definisi pendidikan menurut Islam. Para peserta menyimpulkan bahwa pengertian pendidikan menurut Islam termuat dalam istilah, *ta’lîm*, *tarbiyah*, dan *ta’dîb* (Ibid, 2012: 36).

2. Landasan

Kajian tentang landasan ini menjadi sangat penting, agar bisa rumusan pendidikan politik berbasis pesantren mempunyai acuan yang kuat. Berikut diuraikan beberapa landasannya:

a. Teologis

Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam tentu berpijak kuat pada dasar dan nilai agama. Al-Qur’an dan Hadis menjadi dasar pergerakan dan sistem yang dijalankan di dalamnya. Keduanya diyakini mutlak dan absolut, mengatur seluruh persoalan manusia mulai sebelum lahir bahkan hingga

meninggal. Tak terkecuali dalam persolan politik. Politik yang bermakna teori tentang tata kelola negara dan pemerintahan, hukum, dan perundangan (Arif, <https://printsatumedia.wordpress.com>, Posted on 19/01/2017), atau makna yang sering dipakai sekarang, terlibat dengan kekuasaan, baik masuk dalam pemerintahan (koalisi) sebagai pemangku kebijakan dan pendukung atau berada di luar pemerintahan (oposisi).

Landasan teologis ini bisa di lacak melalui teori global dalam al-Qur'an yang menjelaskan tugas manusia, untuk beribadah kepada Allah (QS: al-Dzariyat: 56) dan untuk '*imaratul ardl*' (Hud: 61), kemudian di implementasikan secara praktis oleh Rasul saat memimpin Madinah dengan meletakkan tata kelola, peraturan dan hukum Negara, dibuktikan dengan terbitnya piagam madinah (*watsiqah madinah*). Praktek sahabat selanjutnya yang mengutamakan kepemimpinan (*al-khilafah*) dibandingkan penguburan jenazah nabi sehingga terpilih Abu Bakar serta *Khulafaurr Rasyidin* lainnya, menegaskan perhatian besar Islam terhadap persoalan politik.

Terlepas dari segala kesederhanaannya, apa yang telah digariskan dan dijalankan oleh Rasulullah ataupun para sahabat (khalifah-khalifah sesudahnya) merupakan konseptualisasi dan implementasi dari apa yang dikehendaki Allah SWT. Dan inilah yang kita maksud dengan 'politik Islam', dalam arti negara berpanduan agama dan pemerintahan berasaskan hukum Tuhan pencipta jagad raya, langit dan bumi, termasuk manusia. Kita boleh menyebutnya '*al-madinah al-fadhilah*' (*the virtuous polity*) atau '*as-siyasah as-syarlyyah*' (state governance based on Divine Law) —meminjam ungkapan *al-Farabi* dan *Ibn Taymiyyah* (*Ibid.*).

Pada fase berikutnya, teori global dan sederhana di atas dikembangkan melalui kajian dan penelitian baik yang dilakukan oleh *salaf* dalam buku khusus tentang tata negara seperti Muhammad ibn al-Hasan as-Syaybani (w. 189/804) dalam kitabnya "*as-Siyar al-Kabir*", ibn Taimiyah, dalam "*al-Siyasah al-Syar'iyah*", al-Mawardi, dalam "*Ahkam al-Sulthaniyah*", atau pembahasan tata negara yang terkodifikasi dalam bab siyasah, imamah pada kitab-kitab fikih, tasawuf dan lainnya. Itu semua menunjukkan perhatian besar Islam- seperti ungkapan Bernard Lewis- terhadap politik yang membedakannya dengan agama lain.

Tidak mengherankan bila sejak lama, al-Ghazali (Al-Ghazali, 1995:31) menegaskan:

والمملك والدين توئمان, فالدين أصل والسلطان حارس, وما لا أصل له فمهدوم
وما لا حارس له فضائع.

b. Landasan Historis

Pelacakan terhadap landasan historis ini, tentu dimulai dari konseptualisasi dan implementasi Rasul terhadap *global theory* al-Qur'an diatas. Disamping posisi Rasul sebagai nabi, beliau juga sebagai kepala Negara. Sebagai nabi, Rasul tidak tergantikan (*la nabiyya ba'di*) namun sebagai kepala Negara, beliau digantikan melalui istilah *khilafah* yang digunakan para kepala Negara setelahnya, dari Sayyidina Abu Bakar hingga Sayyidina Ali Radiallahu 'anhum.

Kaitannya dengan hubungan pesantren dan politik di Indonesia, terdapat beberapa fase historis (Nofiaturrahmah, Jurnal Islamic Review Volume III No. 1 April 2014):

1) Fase Revolusi

Perilaku licik penjajah yang mengakibatkan kemadharatan kepada bangsa ini pada akhirnya memicu perlawanan dari rakyat, termasuk di dalamnya kelompok santri yang dimotori kyai atau para ulama seperti KH. Hasyim Asy'ari. KH. Hasyim merupakan salah satu ulama yang membentuk barisan anak-anak muda untuk mendapatkan latihan kemiliteran. Diawali dari latihan kemiliteran itu, maka terbentuklah laskar *Hizb Allāh*, Laskar *Sabīl li-Allāh* dan Laskar *Mujāhidīn* yang dikenal sebagai pasukan berani mati. Melalui pesantren yang dipimpinnya lahir para tokoh dan pemimpin yang menjadi pelopor perjuangan Indonesia (Masyhuri, 2006: 287).

Selain KH. Hasyim, muncul KH. Wahab yang menyumbangkan hartanya untuk keperluan militer. Ketika agresi militer pemerintah kolonial pecah diberbagai daerah, Kyai Wahab Hasbullah bergabung dalam gerakan gerilya mengkoordinasi unit-unit dan membantu merekrut serta melatih para santri di berbagai pesantren di Jawa Timur (Rifai, 2010: 106).

Kemudian KH. Wahid Hasyim yang dikenal melalui ide-ide brilian membawanya menjadi seorang tokoh (wakil dari kalangan santri) yang aktif membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persembahan fenomenalnya adalah menjadi aktor utama dalam penyusunan "Mukaddimah" atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) (Dhofier, 2011: 147).

Sampai sekarang, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 45 RI) masih menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara dan belum pernah mengalami perubahan. Hal itu merupakan salah satu bukti kontribusi KH. Wahid Hasyim sebagai produk asli "*made in pesantren*" NU yang diberikan kepada Bangsa Indonesia (Ibid, 2011: 147).

Sementara itu, di penghujung pemerintahan Soekarno saat terjadi pemberontakan G-30/S/PKI, kyai dan santri begitu menonjol dalam menumpas

gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Salah satu langkah konkrit yang dilakukan PBNU dalam merespon pemberontakan PKI adalah membentuk Badan Koordinasi Keamanan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (BKKJNU). Tujuan utama didirikannya BKKJNU adalah untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kampanye anti-PKI yang akan dilaksanakan NU di seluruh wilayah Indonesia (Fealy, 2011: 317).

2) Fase Orde Baru

Pasca pemilu 1971, Soeharto membuat kebijakan kontroversial dengan memaksa diadakan fusi (penggabungan) partai-partai politik. Partai NU yang diidentifikasi sebagai partai Islam terpaksa melebur menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia dan Perti (Dakhiri, 2013: 55). Kemudian para kiai memutuskan untuk keluar dari politik untuk 'kembali ke khittah NU 1926', terdapat dua alasan utama mengapa NU mengambil keputusan tersebut. *Pertama*, NU ingin kembali mengurus garapan sosial-keagamaan yang terlantar ketika NU terlibat politik praktis sejak tahun 1952. *Kedua*, keberadaan NU sebagai salah satu unsur dalam PPP telah membuat dakwah NU hanya terbatas pada golongan tertentu, dan tidak bisa menembus ke lingkungan yang lebih luas (Abdallah, 2010: 56).

3) Fase Reformasi

Keran yang ditutup kuat oleh orde baru akhirnya dibuka melalui fase reformasi. Pada fase ini, Kiai dan Pesantren memperoleh kebebasan untuk terjun kembali ke kancah perpolitikan. Kemunculan banyak partai Islam berbasis Kiai dan masa dari pesantren seperti PKB, PKNU dan lainnya menjadi tak terbendung. Dan akhirnya mampu mengantarkan putra pesantren, Gus Dur sebagai presiden RI ke 4.

Fase ini, memberikan ruang sangat luas bagi Kiai dan santri untuk mengambil bagian dalam kancah perpolitikan. Sudah tidak terhitung, jumlah para politisi dari pesantren, baik di kancah lokal kabupaten, provinsi hingga nasional dengan beraneka ragam tugas yang diemban sebagai pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pada fase ini partisipasi Kiai dan pesantren dalam politik praktis mencapai puncaknya.

4) Fase Pasca Reformasi

Di fase ini, sepertinya kita perlu me-reformulasi tentang keterlibatan pesantren dengan politik praktis. Memang terjadi pro-kontra antara yang membolehkan dan mengkritik. Pendapat pertama mengasumsikan bahwa komunitas pesantren bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak

dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lain. Mereka didukung oleh argumentasi teologis bagaimana dan mengapa praktik politik praktis dipilih.

Pendapat ini semakin kokoh apalagi disokong realitas semakin banyak pemimpin pesantren (kiai) yang terjun dalam dunia politik langsung maupun tidak. Pendapat kedua mengkritik dengan keras bahwa keterlibatan pesantren dalam dunia politik lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat (Khoiruddin, 2005: ix-x).

Pendapat kedua diatas seakan menyarankan agar pesantren hanya meneguhkan diri di wilayah kultural, sekedar melakukan kerja-kerja kemasyarakatan, sangat ditentang oleh Kiai Miftahul Akhyar, seorang kiai dari Jawa Timur. Dalam tulisannya di harian *Republika*, ia menyatakan:

Umat Islam khususnya NU harus pandai menyaring pernyataan yang tampak manis tetapi sebenarnya akan memberangus agar NU dan Islam di luar pemerintahan dan dikuasai orang Islam tetapi tidak mengerti kemauan dan kebutuhan Islam. Justru pernyataan agar kiai dan NU jangan terlibat politik merupakan usaha dari kelompok sekuler untuk melemahkan Islam (Miftahul Akhyar, http://www.republika.co.id/berita/66656/Kiai_NU_tidak_akan_Tinggalkan_Politik, diakses pada 2 Desember 2010).

Memang benar, bahwa politik praktis adalah hak bagi setiap warga Negara, pun juga punya landasan teologis yang sangat dibenarkan oleh agama, namun diperlukan sikap hati-hati agar tidak terjadi sebaliknya.

Perlu dikemukakan salah satu hasil penelitian Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta*, dengan rekomendasi sebagai berikut:

Pesantren perlu hati-hati dalam menentukan sikap politiknya, sebab keterlibatan politik pesantren memiliki dampak yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Apalagi bila kesibukan politik telah melalaikan kiai maupun pengelola pesantren dari urusan pendidikan di pesantren. Mungkin di masa depan pesantren perlu melakukan revitalisasi peran politik yang lebih sesuai dengan semangat zaman dan keinginan masyarakat yang sudah semakin rasional. Bagaimanapun politik pesantren pada dasarnya bukan politik kekuasaan, tetapi politik kerakyatan yang bergerak pada ranah kultural. Pada banyak kasus yang terjadi justru Kiai dan Pesantren hanya dijadikan objek kepentingan politis, setelah tujuan dan kepentingan tercapai, maka ditinggalkan. (Ernas dan Siregar, , Jurnal Kontekstualita, 2010: vol, 25, no. 2).

3. Reformulasi Hubungan Pesantren dan Politik

Pada awalnya, politik praktis memang hak bagi siapapun, termasuk Kiai dan pesantren bahkan Kiai yang punya kekuatan *basic* agama teori dan praktek, sangat dianjurkan ikut mengisi pos-pos politik praktis di semua tingkatannya, sebab bila orang baik seperti Kiai menjauh dari politik, maka nasib politik akan semakin suram karena diisi orang-orang yang tidak baik.

Orang baik harus berpolitik. Tapi menjadi politisi tidak cukup bermodal baik, modal kemampuan dan wawasan politik wajib dimiliki. Disatu sisi, Kiai dan pesantren wajib berhati-hati berpolitik praktis, selain karena politik membuka pintu *masalah* sangat luas, namun di lain sisi memungkinkan terjadinya *mudlarat* yang lebih besar. Independensi Kiai dan Pesantren sebagai panduan moral masyarakat, rujukan persoalan sosial, hukum agama yang sangat mementingkan halal-haram, menjadi taruhannya.

Sebab itu, disamping opsi diatas yang sudah mulai umum dipraktekan, diperlukan opsi lain yang lebih cerdas. Salah satunya dengan mereformulasi hubungan pesantren dan politik melalui pendidikan politik bagi kader pesantren, santri.

Pada opsi ini, pesantren tidak berpolitik praktis tapi menyediakan ruang dan rujukan bagi santri untuk menjadi politisi. Pendidikan politik tentang ilmu menjadi politisi baik sekaligus cerdas dan tangkas. Melalui modal teologis dan historis diatas, pesantren punya landasan kuat untuk menginternalisasi pendidikan politik dalam sistem pesantren. Berbeda dengan ilmu politik yang diajarkan di luar, yang hanya mementingkan pencapaian kekuasaan, pendidikan politik pesantren bukan hanya tentang kekuasaan, tapi pengabdian, penebaran kemaslahatan dan kemampuan mengelola ketatanegaraan.

SIMPULAN

Pesantren sebagai lembaga keagamaan menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan landasan-landasan ideologis. Yang memerintahkan mengaitkan dan mengeratkan hubungan antara agama dan Negara, bukan malah merenggangkan apalagi bersikap sekularistik terhadap keduanya. Pernyataan Imam Ghazali pada kutipan diatas sebagai landasan paham ulama sejak dahulu.

Dari tinjauan historis di Indonesia, sejak awal pesantren sama sekali tidak pernah “meninggalkan” politik baik di dalam pemerintahan sebagai bagian koalisi atau diluar pemerintahan dalam barisan oposan.

Dua poin diatas, adalah modal kuat agar pesantren ke depan harus melakukan penataan yang terstruktur dan sistematis untuk menyiapkan diri,

mengarahkan para santri potensial yang punya kemampuan dan pribadi luhur agar bisa menjadi bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus yang mengawal atau yang merusukan kebijakan-kebijakan pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz.1, Beirut: Dar al-Fikir, 1995.
- Al-Ashfihânî, *Al-Mufradât fî Gharîb Al-Qurân*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1412 H.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat PRESS, 2002.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004,.
- Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-10, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Fifi Nofiaturrahmah, *Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan Di Indonesia*, Jurnal Islamic REview Volume III No. 1 April 2014 M.
- Khoiruddin, *Politik Kiai*, Yogyakarta: Averroes Press, 2005.
- Masyhuri, Aziz, *99 Kyai Nusantara (Riwayat, Perjuangan dan Doa)*, Yogyakarta: Kutub, cet. i, 2006.
- Muhammad Rifai, *KH. Wahab Hasbullah, Biografi Singkat 1888-1971*, Yogyakarta: Garasi House Of Book, cet. i, 2010.
- Muh Hanif Dhakiri, *NU Jimat NKRI dan Jimat Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. i, 2013.
- Mastuhu, mengutip pendapat Ruppert C. Lodge, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Rasyid Manshur Al-Shabahî, *'Ardu Manhaj Al-Qur'an Fi Al-Tabiyah Al-Rabbaniyah*, Iskandariyah; Dar Al-Iman, 2008.
- Saidin Ernas dan Ferry Muhammadsyah Siregar, *Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta*, Jurnal Kontekstualita, vol, 25, no. 2,
- Sudatro, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Soegarda Poerbakawtja, et. Al. *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Soegarda Poerbakawtja dan A. H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, cet. II, Jakarta: Gunung Agung, 1981.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta; Balai Pustaka, 1994.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1994
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012. Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2010.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ulil Absar Abdallah, *Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta: Kompas, cet. i, 2010.
- Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta Barat: LP3ES, cet. ix, 2011
- Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta; LKiS, cet. i, 2011.
- Syamsuddin Arif, *Islam dan Politik*, <https://printsatamedia.wordpress.com/2017/01/19/islam-danpolitik-kajian-dan-pandangan/>, Posted on 19/01/2017
- Miftahul Akhyar, *Kiai NU Tidak Akan Tinggalkan Politik*, [http://www.republika.co.id/berita/66656/Kiai NU tidak akan Tinggalkan an Politik](http://www.republika.co.id/berita/66656/Kiai%20NU%20tidak%20akan%20Tinggalkan%20Politik), diakses pada 2 Desember 2010.
- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020>.
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Diamanty Meiliana

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11223141/kpk-catat-397-pejabat-politik-terjerat-korupsi-sejak-2004-hingga-mei-2020>

<https://www.nu.or.id/post/read/96680/ruu-pesantren-kembalikan-fungsi-dan-peran-penting-pesantren>